

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN FLORES TIMUR 2017**

ISBN : 978-602-5461-15-6
No. Publikasi : 53090.1824
Katalog BPS : 7102025.5309
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 31

Naskah :

BPS Kabupaten Flores Timur

Desain Kover :

BPS Kabupaten Flores Timur

Penyunting :

BPS Kabupaten Flores Timur

Diterbitkan oleh :

© **BPS Kabupaten Flores Timur**

Dicetak oleh

CV. CHRISEVEL

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN FLORES TIMUR
2017

Pengarah:

Ir. Kornelis Lonek Ama

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Kornelis Lonek Ama

Penanggung Jawab Teknis:

Ir. Kornelis Lonek Ama

Penyunting:

Wisnu Widya Asmara, SST

Penulis:

Wisnu Widya Asmara, SST

Pengolah Data:

Wisnu Widya Asmara, SST

Desain:

Wisnu Widya Asmara, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 adalah publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur yang pertama kali diterbitkan. Publikasi ini menyajikan beraneka jenis data kuantitatif serta analisis deskriptif dari indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan komoditas konstruksi di Kabupaten Flores Timur.

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur 2017 tersusun dari berbagai sumber seperti dinas, pengusaha perdagangan komoditas konstruksi dan alat berat, serta berbagai sumber lainnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat berbagai informasi terpilih mengenai tingkat kemahalan konstruksi.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi, untuk itu tanggapan dan saran-saran dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan penerbitan mendatang.

Larantuka, Oktober 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Flores Timur,



= Ir. Kornelis Lonek Ama =
NIP. 196605011993031003

I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	4
II. KONSEP DAN DEFINISI	7
III. METODOLOGI	16
3.1 Ruang Lingkup dan Sumber Data	16
3.2 Metode Penghitungan IKK	17
3.3 IKK 2017	22
IV. ANALISIS	25
4.1 IKK Kabupaten Flores Timur 2017	26

*D
a
f
t
a
r

G
a
m
b
a
r*

Halaman

4.1	IKK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017	27
4.2	Pergerakan IKK Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2017	30

<https://florestimurkab.bps.go.id>

*D
a
f
t
a
r

T
a
b
e
l*

Halaman

4.1	IKK Kabupaten/Kota Provinsi Tenggara Timur, Tahun 2017	Nusa	28
-----	---	------	----

<https://florestimurkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah membuat suatu mekanisme dimana suatu daerah dapat mengelola daerahnya sendiri. Mekanisme pemberian kekuasaan dan kewenangan pada suatu daerah untuk mengelola daerahnya sendiri disebut otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi melalui UU No. 24 adalah salah satu langkah pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didaerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pada kenyataannya tidak semua daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Oleh karenanya, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan berupa sumber keuangan seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada tiap daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sehingga perumusan penghitungan DAU memerlukan data yang akurat dan *terupdate* sehingga pemberian DAU di tiap daerah menjadi adil dan merata sesuai porsinya. Dalam perumusan penghitungan DAU dibutuhkan beberapa data penting suatu daerah seperti jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, angka produk domestik regional bruto (PDRB), serta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

IKK merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga komoditas konstruksi antar daerah. Untuk menghitung IKK diperlukan beberapa data, yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, upah jasa konstruksi dan bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei Serentak Harga Barang Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, Upah Jasa Kontruksi dalam rangka penghitungan IKK yang dilakukan setiap triwulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari Bill of Quantity (BoQ). BoQ adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan persatuan ukuran luas dari 3 jenis bangunan yang ditentukan. Ketiga jenis bangunan ini

yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan; serta bangunan lainnya.

Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik seperti: bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya IKK untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi. Dengan adanya IKK dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pembentuk modal tetap, maka keterbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dapat dianalisis serta dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan mengenai pembangunan.

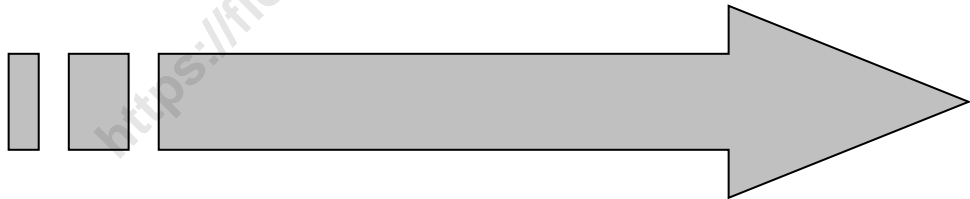
1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna data, baik instansi pemerintah maupun swasta mengenai informasi tentang indeks yang menggambarkan kondisi kemahalan komoditas konstruksi di Kabupaten Flores Timur tahun 2017. Publikasi ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukannya bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur agar kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

<https://florestimurkab.bps.go.id>

KONSEP DAN DEFINISI



BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara party/grosir dan juga menjual barang

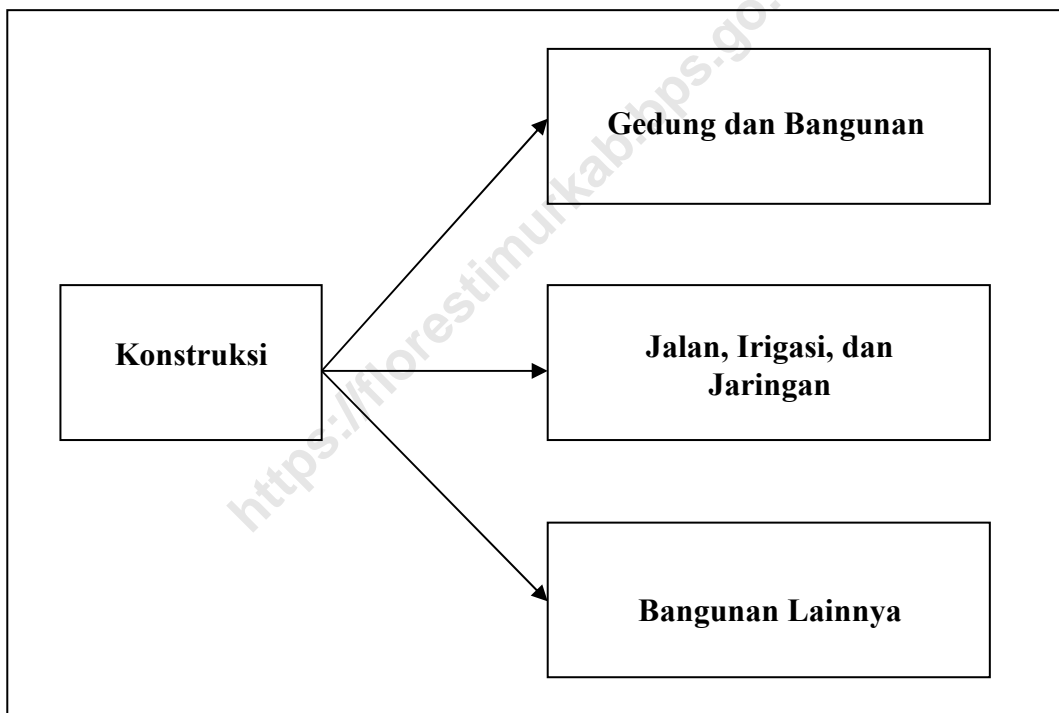
secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.

5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang besar** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.
9. **Party/grosir** atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini bersifat relative, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
10. **Kegiatan konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya

baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

Sektor konstruksi diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang disebut *basic heading* yang dapat dilihat seperti di bawah ini:

Gambar 2.1 Basic Heading



Gedung dan bangunan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Gedung dan bangunan untuk tempat tinggal, meliputi rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Gedung dan bangunan bukan untuk tempat tinggal meliputi gedung perkantoran, industri, kesehatan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam perhitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Bangunan umum untuk pekerjaan pertanian, terdiri dari:
 - a. Bangunan pengairan, meliputi pembangunan waduk (reservoir), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, terdiri dari:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi terdiri dari:
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral komunikasi, meliputi bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima *radar microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi instalasi air bersih dan air limbah, dan saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah, dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan tinggi.

- g. Instalasi gas, meliputi pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal, dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan klasifikasi untuk bangunan lainnya terdiri dari bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab, dan pemasangan kerangka baja, pengerukan konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

- 11. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Harga sewa termasuk biaya sewa alat, jasa operator alat, tetapi tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan bahan bakar.
- 12. **Upah** adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang.

13. **Paket komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.
14. **Kualitas provinsi** adalah kualitas yang dominan di suatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.
15. **Diagram timbang atau bobot** yang digunakan dalam penghitungan IKK 2017 terdiri dari diagram timbang IKK dengan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang umum yang digunakan dalam penghitungan IKK 2017 berasal dari realisasi anggaran daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk pembangunan konstruksi.
16. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu

kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional.

17. **Bill of Quantity (BoQ)** adalah daftar dan kuantitas pekerjaan yang penyusunan dan perhitungannya didasarkan atas gambar lelang, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum yang digunakan sebagai standar acuan bagi peserta lelang dalam mengajukan penawaran harga.

<https://florestimurkab.bps.go.id>

METODOLOGI



BAB III

METODOLOGI

3.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data IKK Kabupaten Flores Timur mencakup:

1. Harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi meliputi upah dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang cat, tukang listrik, dan pembantu tukang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi yang terangkum dalam survei yang dikenal dengan Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi, Sewa Alat Berat, dan Upah Jasa Konstruksi dalam Rangka Penghitungan IKK Tahun 2017.
2. Sebagai pendukung, terdapat juga data BoQ yang diperoleh melalui kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. BoQ yang digunakan dalam penghitungan IKK 2017 berupa realisasi pelaksanaan proyek menurut kelompok jenis pada tahun 2016.
3. Kegiatan pencacahan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 30 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam program data entri dari Subdirektorat Harga Perdagangan Besar untuk diolah lebih lanjut.

3.2 Metode Penghitungan IKK

Dalam melakukan penghitungan IKK dibutuhkan data/komponen penunjang, seperti paket komoditas, diagram timbang, dan data harga-harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

a. Paket Komoditas IKK

Pengertian paket komoditas IKK dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2017, diasumsikan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 47, terdiri dari 33 jenis bahan bangunan dan 6 sewa alat berat, dan 8 jasa konstruksi.

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2017 terdiri dari 33 jenis barang dan 6 sewa alat berat yang dipilih dari 60 jenis barang dan 6 sewa alat berat yang terdapat dalam daftar HPB-K. Adapun jenis barang dan sewa alat berat tersebut yaitu: tanah urug, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, seng gelombang, paku, semen portland, besi beton, bak mandi fiber, kloset, seng plat, pipa PVC, kayu balok, kayu papan, kayu lapis, cat emulsi, cat minyak, tegel/keramik, genteng/atap, kaca, aspal, gypsum, kabel, bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II, mesin pompa air, rangka atap baja, aluminium, tangki air fiber, lampu mcb, *excavator*, *bulldozer/tracked tractor*, *skid steer loader*,

tandem vibrating roller, compact tract loader, dump truck dan jasa-jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang digunakan diantaranya: upah mandor, upah kepala tukang, upah tukang kayu, upah tukang batu, upah tukang cat, upah tukang listrik, pembantu tukang, dan upah lainnya. Jenis-jenis barang konstruksi, sewa alat berat, serta jasa konstruksi seperti yang disebutkan tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar. Disamping itu, data harga barang-barang *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

b. *Bill of Quantity*

Penghitungan IKK kabupaten/kota tahun 2017 ini menggunakan dua jenis penimbang, yakni *Bill of Quantity* dan diagram timbang IKK umum. *Bill of Quantity* kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis bangunan. Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok jenis bangunan dapat berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2017 menggunakan data Realisasi APBD tahun 2016. Cara penyusunan diagram timbang umum IKK sama dengan cara penyusunan diagram timbang Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi umum yang intinya adalah memilih pengeluaran untuk pembangunan fisik dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok jenis bangunan.

c. Harga Jenis Bahan Bangunan/Sewa Alat dan Jasa

Data ini dikumpulkan melalui survei IKK yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pencacahan dilakukan sebanyak 4 (empat) dalam setahun yaitu setiap tanggal 20 sampai dengan 30 pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Responden yang dicacah adalah pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa persewaan alat berat. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Khusus untuk pengumpulan data harga bahan bangunan yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu, produsen, pedagang campuran (pedagang grosir sekaligus eceran), dan yang terakhir pedagang eceran.

Lokasi responden survei IKK harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Pengecualian dikhususkan untuk barang-barang natural seperti: pasir, batu pondasi, batu split, batu batako dan kusen. Pencacahan barang-barang tersebut boleh dari produsen yang tidak berada di ibukota kabupaten/kota.

Data harga yang digunakan untuk penghitungan IKK Tahun 2017 adalah harga barang-barang konstruksi yang pada 4 (empat) tahapan, yakni periode bulan Juli dan Oktober 2016 serta Januari dan April 2017.

Untuk Kabupaten Flores Timur, responden survei ini terdiri dari Toko bahan bangunan, toko keramik, toko cat, toko kaca/aluminium, toko kayu, toko batako, dan pembuatan batu bata sedangkan untuk jasa konstruksi respondennya terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor. Untuk data sewa alat berat responden adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur.

d. Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2017 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan:

NK : Nilai Komponen

P_k : Harga material/upah/sewa alat ke-k

Q_k : Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

NK : nilai komponen

C_i : *dummy* kab/kota

P_j : *dummy* komponen dalam suatu sistem

α_i dan β_j : Koefisien regresi

PPP Sistem: $\exp(\alpha_i)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{bangunan}} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{\text{sistem}_i} \right)^{1/n}$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{bangunan_i})^{bobot_i} \right) \cdot 100$$

3.3 IKK 2017

IKK telah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2017 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2016.

IKK tahun 2017 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2016, akhir Oktober 2016, akhir Januari 2017, dan akhir April 2017. Seperti halnya IKK tahun 2016, IKK tahun 2017 menggunakan 4 periode

pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

<https://florestimurkab.bps.go.id>

ANALISIS



BAB IV

ANALISIS

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional. Indeks yang ada menunjukkan ketimpangan harga komoditas konstruksi antara suatu daerah dengan daerah lain. Ketimpangan yang terjadi di suatu daerah tentu membuat daerah tersebut kesulitan mengembangkan daerahnya khususnya dalam bidang pembangunan, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk memperbaikinya.

Mulai tahun 2010, IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Pada tahun 2010, Kota Samarinda adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491 Kabupaten/kota yang sama dengan 100, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dipilih sebagai kota acuan.

Untuk tahun 2017, kota Surabaya dijadikan kota acuan dengan angka IKK sebesar 100,00. Dengan demikian Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi acuan untuk angka IKK provinsi se Indonesia.

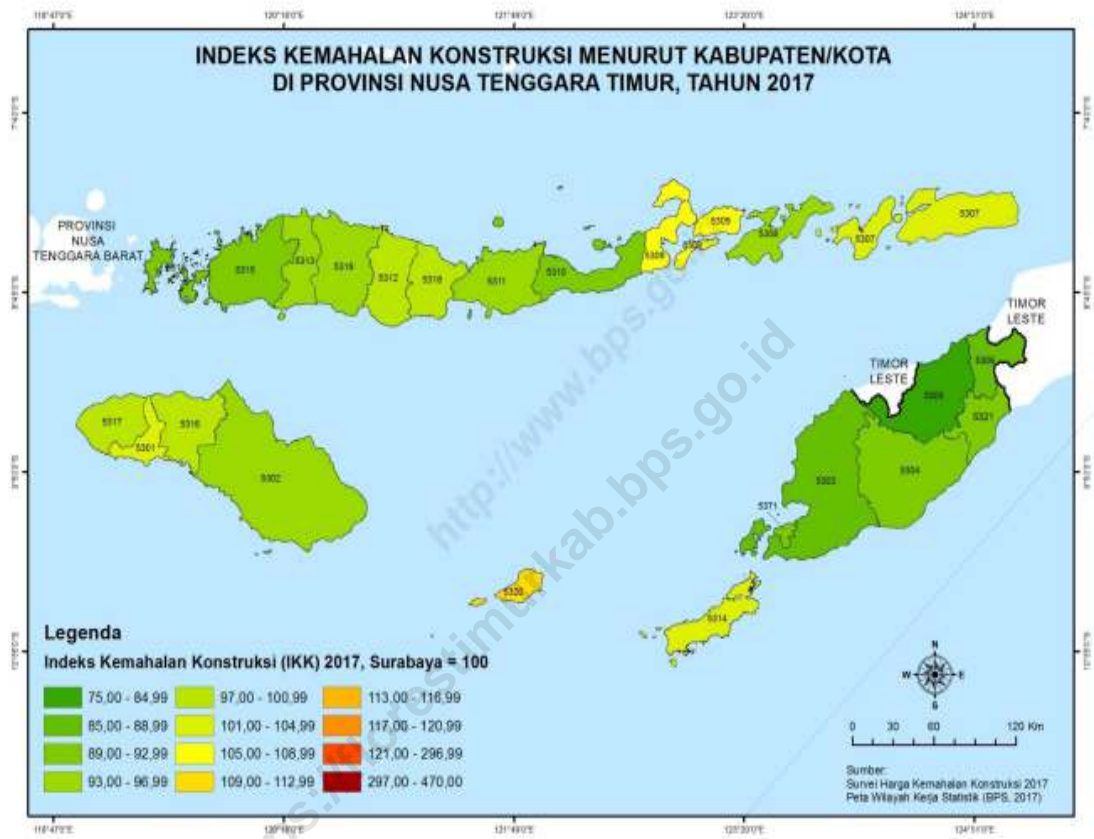
Kondisi geografis suatu wilayah juga memberikan pengaruh terhadap besaran IKK yang dalam penghitungannya juga memasukkan komponen harga bahan bangunan/konstruksi. Suatu wilayah kabupaten/kota yang terletak di pegunungan biasanya memiliki akses distribusi barang yang sulit. Hal ini menyebabkan tingginya harga suatu komoditas di daerah tersebut akibat kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi. Kondisi ini umumnya terjadi di kabupaten/kota diluar Pulau Jawa.

4.1 IKK Kabupaten Flores Timur

Flores Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak antara 80 4' sampai 80 40' Lintang Selatan dan antara 1220 38' sampai 1230 57' Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari 17 pulau, 3 di antaranya berpenghuni. Flores Timur Daratan, Adonara, dan Solor merupakan nama-nama pulau yang berpenghuni. Luas wilayah daratan kabupaten Flores Timur 1.812,85 Km² , 58,85% di antaranya merupakan wilayah Flores Daratan, sedangkan Pulau Adonara dan Solor luasnya masing-masing 28,66% dan 12,49% dari total seluruh luas daratan di Kabupaten Flores Timur.

Gambar di bawah ini menunjukkan besaran IKK di masing-masing kabupaten/kota yang dilihat dari letak geografis masing-masing. Harga komoditas di suatu kabupaten/kota juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Untuk daerah dengan kondisi geografis kepulauan biasanya memiliki akses dengan distribusi barang yang lebih sulit jika dibandingkan daerah daratan. Hal ini mengakibatkan harga-harga komoditas menjadi lebih mahal.

Gambar 4.1 IKK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 4.1 IKK Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017

Wilayah	2017
(1)	(2)
Sumba Barat	103.73
Sumba Timur	95.26
Kupang	88.23
Timor Tengah Selatan	91.49
Timor Tengah Utara	83.34
Belu	87.36
Alor	103.92
Lembata	94.44
Flores Timur	106.84
Sikka	89.5
Ende	95.5
Ngada	97.47
Manggarai	94.79
Rote Ndao	102.82
Manggarai Barat	91.57
Sumba Tengah	100.78
Sumba Barat Daya	99.42
Nagekeo	99.77
Manggarai Timur	96.15
Sabu Raijua	112.33
Malaka	90.69
Kota Kupang	90.63
Nusa Tenggara Timur	95.94

Sumber : Badan Pusat Statistik

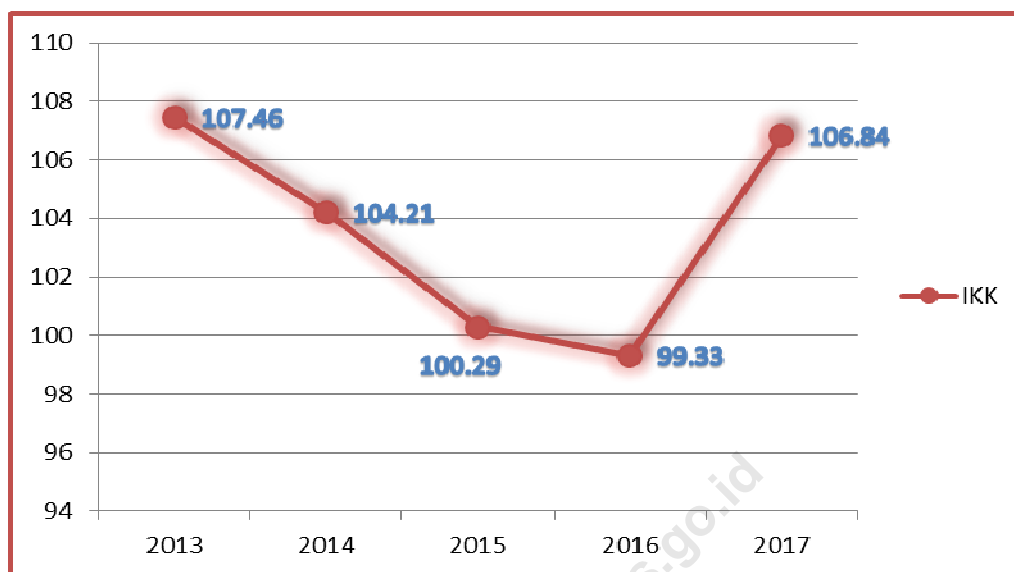
Secara umum untuk Provinsi NTT rata-rata IKK tahun 2017 sebesar 95,94. Artinya harga rata-rata satu satuan bangunan/konstruksi di kabupaten/kota di NTT lebih rendah 4,06 persen dibandingkan dengan kota acuan Surabaya.

Dapat dilihat dari Tabel 4.1, angka IKK Kabupaten Flores Timur tahun 2017 merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Sabu Raijua dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT, maka membangun di Kabupaten Flores Timur memerlukan biaya yang paling mahal setelah Kabupaten Sabu Raijua. Dengan kata lain, Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kedua termahal untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Provinsi NTT.

Melihat posisi IKK kabupaten Flores Timur yang berada di peringkat kedua tertinggi dibandingkan dengan kab/kota lain memberikan gambaran yang cukup unik sebab dari segi geografis Kabupaten Flores Timur letaknya tidak sejauh kabupaten seperti Lembata dan Alor. Kesulitan akses untuk pendistribusian barang konstruksi seharusnya tidak sesulit dengan dua daerah yang letaknya lebih jauh dari Kabupaten Sikka sebagai daerah yang dilewati jalur tol laut tempat didatangkannya komoditas konstruksi dari luar wilayah NTT.

Secara umum, DAU yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan tiap daerah sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, IKK merupakan salah satu indikator penting selain jumlah penduduk dan IPM dalam menentukan perumusan DAU. Untuk melihat lebih jauh mengenai gambaran nilai IKK Kabupaten Flores Timur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2 Pergerakan IKK Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS(diolah)

Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 selalu terjadi penurunan nilai IKK dari 107,46 menjadi 99.33. Adanya penurunan selama tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan usaha yang cukup tinggi dari pembuat kebijakan hingga nilai IKK mencapai angka dibawah kota acuan. Namun dari tahun 2016 menuju 2017 terjadi kenaikan hingga angkanya mencapai 106,84. Hal ini menandakan ketidakstabilan yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dilihat dari IKK yang masih fluktuatif.

Tingkat kemahalan konstruksi Kabupaten Flores Timur yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi NTT dapat disebabkan akibat dari jauhnya jarak pusat produksi maupun distribusi barang atau besarnya tingkat kesulitan distribusi sehingga beban biaya transportasi menjadi besar dan akibatnya harga barang meningkat. Namun jika dilihat bahwa IKK Flores Timur lebih tinggi dari Kabupaten Lembata dan Alor dalam tahun 2017 menunjukkan

bahwa besaran nilai IKK tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kesulitan geografis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang merupakan komponen pembentuk IKK itu sendiri, seperti tingkat kemahalan harga barang/bahan bangunan, besaran sewa alat berat dan besaran balas jasa pekerja sektor konstruksi, serta besaran realisasi anggaran pembangunan daerah itu sendiri.

<https://florestimurkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jl. San Juan, Sarotari Tengah, Larantuka,
86219 Telp (0383) 21164, Faks (0383) 21164,
e-mail : bps5309@bps.go.id

ISBN 978-602-70946-2-8



9 786027 094628